



**LAPORAN KEMAJUAN
USK FINANCIAL MANAGEMENT REPORT
(Periode Juli 2009)**

A. Kemajuan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan Loan IBRD 7504-IND; IDA Credit 4384-IND pada Bulan Juli 2009 termasuk didalamnya pengelolaan dana P2KP Advance Loan IBRD 4779-IND; IDA Credit 4063-IND (UPP-3); IBRD 4664-IND; IDA Credit 3658-IND; IDA Credit 3658-1-IND (UPP-2) secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengolahan data Aplikasi FMR untuk pertanggungjawaban kepada Bank Dunia atas pencairan dana selama Quartal ke 2 periode April sampai dengan Juni 2009.
2. Pengisian kembali dana di Rekening Khusus PNPM Mandiri Perkotaan untuk pencairan 3 bulan kedepan yaitu Quartal 3 periode Juli sampai dengan September 2009.
3. Penyusunan aplikasi Reimbursement kepada dana Talangan Pemerintah atas penggunaan dana Rekening Sub Bendahara Umum Negara.
4. Melakukan monitoring insidental ke beberapa daerah terkait dengan permasalahan pencairan dana akibat dari adanya penolakan oleh beberapa KPPN di Propinsi/Kabupaten/Kota khususnya di Kabupaten Buleleng Propinsi Bali.

Adapun capaian kegiatan selama bulan Juli 2009 terhadap pelaksanaan kegiatan pada USK FMR dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terupdatenya Data Base FMR karena telah dilakukan Imputing dan Cross cecking data pencairan berdasarkan RKBI dan RK-SBUN terhadap SP2D di seluruh KPPN penerbit di Propinsi dan Kabupaten/Kota lokasi PNPM – MP dan P2KP Advance sampai dengan Juli 2009 untuk penyusunan aplikasi FMR di Bulan Agustus 2009.
2. Tersusunnya Draft Aplikasi FMR untuk pertanggungjawaban kepada Bank Dunia atas pencairan dana selama Quartal ke 2 periode April sampai dengan Juni 2009.
3. Tersusunnya aplikasi Reimbursement kepada dana Talangan Pemerintah atas penggunaan dana Rekening Sub Bendahara Umum Negara.
4. terselesaikannya solusi permasalahan pencairan dana BLM di Kabupaten Bululeng Propinsi Bali.

Terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan khususnya terkait dengan pencairan dana pada semua kategori baik BLM maupun Fixed Cost, memang mengalami beberapa hambatan teknis yang sudah barang tentu akan berpengaruh terhadap kinerja penyerapan Satker secara keseluruhan. Adapaun beberapa kendala teknis yang sangat menghambat pencairan dana di lapangan adalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan kecepatan dan ketepatan dalam meng-update data base FMR khususnya pencairan dana berdasarkan SP2D pada semua Kategori di semua lokasi PNPM-MP dan P2KP, maka saat ini masih dilakukan pengembangan terhadap sistem aplikasi SP2D on line sehingga sementara belum terbangunnya sistem tersebut oleh USK SIM KMP maka USK FMR masih melakukannya secara manual.
2. Penyusunan Draft aplikasi membutuhkan otorisasi dari beberapa pihak yaitu Satker Pusat PNPM-MP, Departemen Keuangan dan Bank Dunia sehingga perlu waktu untuk bisa ditayangkan pada Website P2KP.

3. Sampai dengan saat ini banyak satker di daerah yang belum menggunakan standart pencairan SP2D yang sesuai dengan pembebanan dana dalam DIPA, hal ini berakibat banyaknya pembebanan dana yang tidak sesuai peruntukannya (back log) yang sudah barang tentu USK FMR harus mengklarifikasi dan mengembalikan pencairan yang salah beban pada porsinya masing-masing.
4. Terkait dengan pencairan di daerah khususnya untuk dana Fixed Cost maupun BLM tunggakan atau alokasi dana Tahun Anggaran 2008 yang dibayarkan pada Tahun Anggaran 2009 sesuai Revisi 1 DIPA TA. 2009 terhadap nomor register untuk masing-masing Loan, ternyata banyak mengalami penolakan oleh KPPN setempat. Hal ini disebabkan karena alokasi dalam Mata Anggaran Kegiatan (MAK) DIPA berjalan tidak menegaskan secara eksplisit tentang besaran dana sisa TA. 2008 yang dibayarkan TA. 2009, sehingga KPPN meminta untuk dilakukan Revisi kembali terhadap DIPA tersebut.
5. Revisi DIPA TA. 2009 sendiri memerlukan beberapa prasyarat untuk dilakukan yang salah satunya adalah harus adanya Hasil Verifikasi BPKP terhadap kegiatan sisa 2008 yang akan dibayar pada TA. 2009 dan nilainya di atas 500 juta. Hal ini menjadi permasalahan baru ketika BPKP Perwakilan belum melakukan verifikasi pada kegiatan TA. 2008 atau ketika daerah bermasalah tidak menjadi cakupan sampel dalam pelaksanaan Audit oleh BPKP Perkwailan, karena untuk dilakukan verifikasi ulang butuh waktu yang cukup lama.
6. Terkait dengan permasalahan revisi DIPA TA. 2009 bisa dilakukan sendiri oleh masing-masing Satker di Kanwil Dirjen Anggaran dan Perbendaharaan setempat, atau bisa menunggu Revisi DIPA Nasional yang dilakukan secara serentak di Jakarta, namun hal ini memerlukan waktu yang cukup lama karena menunggu hasil penetapan DPR terhadap alokasi dana APBN Perubahan.

B. Rekomendasi

Rekomendasi terhadap Isu strategis terkait pelaksanaan PNPM baik yang bersumber dari Loan Bank Dunia maupun Loan IDB dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terkait Dokumen anggaran (DIPA) Pusat, Propinsi dan Kabupaten TA. 2009, maka harus segera dilakukan Revisi DIPA secara nasional dengan mengakomodir permasalahan yang terjadi di semua daerah sehingga memudahkan dalam pencairan oleh KPPN setempat.
2. Terhadap perubahan tambah kurang atas dana BLM dan Jasa Konsultan perlu dilakukan pembahasan Revisi DIPA berbarengan dengan dilakukannya APBN-Perubahan pada awal Agustus 2009 secara bersama oleh semua stake holder.
3. Terkait Loan PNPM yang bersumber dari IDB maka Perdirjen tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Pinjaman IDB Nomor IND-131(IST)/132(LN) (Integrated Community-Driven Development Project) yang mengatur pencairan dana di lokasi IDB PNPM sudah disahkan namun belum dapat dilakukan pendistribusiannya karena saat ini dana initial deposit belum masuk sehingga dikhawatirkan jika terjadi pencairan akan membebani rekening talangan pemerintah. Terhadap permasalahan tersebut harus dilakukan koordinasi nasional terkait pengefektifan dana Loan IDB yang mensyaratkan finalisasi atas PJM Pronangkis di semua lokasi IDB.

C. Rencana Kegiatan USK FMR (Agustus 2009)

Terkait dengan permasalahan sebagaimana rekomendasi tersebut di atas maka USK FMR akan melakukan beberapa hal strategis secara berkesinambungan dan progresif diantaranya:

1. Terkait Dokumen anggaran (DIPA) Pusat, Propinsi dan Kabupaten TA. 2009, maka akan dilakukan rapat rutin yang membahas percepatan Revisi DIPA TA. 2009 bersama seluruh stake holder terkait.

2. Bersamaan dengan dilakukannya Revisi di Pusat atas DIPA TA. 2009 maka akan dilakukan fasilitasi terhadap daerah yang akan melakukan revisi sendiri di Kanwil setempat jika memungkinkan.
3. Akan dilakukan rapat konsolidasi terkait percepatan efektifnes atas Loan IDB yang akan mengakomodir pencairan dana BLM khususnya di lokasi Sumatera, Jawa Barat, Banten dan Kalimantan Barat.
4. Terkait Loan PNPM yang bersumber dari IDB maka Perdirjen tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Pinjaman IDB Nomor IND-131(IST)/132(LN) (Integrated Community-Driven Development Project) yang mengatur pencairan dana di lokasi IDB PNPM yang sudah disahkan akan segera dapat dilakukan pendistribusiannya setelah dana initial deposit disetujui.

Tabel Progres Pencairan dana Loan (Progress Sheet)

Bulan Juli 2009

No.	KATEGORI	Plafond		Progres Pencairan Juli 2009		TOTAL s/d Juli 2009		%	Ket.
		USD	IDR	USD	IDR	USD	IDR	thd Plafond	
1	Kelurahan Grant (BLM)	124,919,960.00	1,174,247,624,000	4,935,243.02	49,666,500,000	9,863,212.86	100,276,500,000	7.9%	
2	Goods and Consultant Services	45,398,650.00	426,747,310,000	3,308,677.94	33,387,261,233	12,362,810.21	132,300,180,575	27.2%	
3	Front and fee	131,700.00	1,237,980,000	-	-	-	-	-	

Catatan :